



Struktur Ekonomi, Sektor Basis, dan Kemandirian Fiskal: Analisis PDRB Kabupaten Aceh Tengah 2020–2024

Ibnuh Sukoco^{1*}, Sirodjuzilam Hasyim², M. Syafii³, Thomas Firdaus Hutahaean⁴

^{1,* 2,3,4}Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: ^{1*}ibnu.sukoco88@gmail.com, ²sirojuzilam@usu.ac.id, ³syafiimuhammad91@gmail.com,

⁴firdausthom@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis struktur ekonomi, sektor basis, dinamika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), hubungan PDRB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta implikasi sosial di Kabupaten Aceh Tengah periode 2020–2024. Data yang digunakan berupa PDRB menurut lapangan usaha, PDRB per kapita, dan PAD dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif melalui penyajian tabel dan grafik, disertai pembacaan hubungan PDRB–PAD dan indikasi perubahan sosial. Hasil menunjukkan struktur ekonomi didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan dukungan sektor perdagangan, konstruksi, dan jasa pemerintahan, sementara sektor jasa seperti akomodasi, transportasi, dan jasa keuangan tumbuh pesat pasca PON XXI. PDRB dan PDRB per kapita meningkat konsisten, tetapi rasio PAD terhadap PDRB masih rendah sehingga kemandirian fiskal belum optimal. Perkembangan ekonomi berimplikasi pada peningkatan daya beli, pergeseran pola konsumsi, diversifikasi mata pencaharian, dan munculnya kelas menengah baru. Temuan ini menegaskan pentingnya hilirisasi komoditas unggulan, penguatan basis pajak daerah, dan pengembangan sektor jasa berkelanjutan untuk mendorong kemandirian fiskal dan pembangunan sosial yang inklusif di Aceh Tengah.

Kata Kunci: Aceh Tengah, Kemandirian Fiskal, PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Sektor Basis.

Abstract

This study analyzes the economic structure, base sectors, dynamics of Gross Regional Domestic Product (GRDP), the relationship between GRDP and Regional Original Revenue (PAD), as well as social implications in Central Aceh Regency during the 2020–2024 period. The data used include GRDP by business field, GRDP per capita, and PAD sourced from the Central Statistics Agency (BPS) and the Central Aceh Regency Government. The analysis was conducted using quantitative descriptive methods through the presentation of tables and graphs, accompanied by an examination of the GRDP–PAD relationship and indications of social change. The results show that the economic structure is dominated by the agriculture, forestry, and fisheries sectors, supported by trade, construction, and government services sectors, while service sectors such as accommodation, transportation, and financial services have experienced rapid growth following the XXI National Sports Week (PON XXI). GRDP and GRDP per capita have shown consistent increases; however, the PAD-to-GRDP ratio remains low, indicating that fiscal independence is not yet optimal. Economic development has implications for increased purchasing power, shifts in consumption patterns, livelihood diversification, and the emergence of a new middle class. These findings underscore the importance of downstreaming leading commodities, strengthening the regional tax base, and developing sustainable service sectors to promote fiscal independence and inclusive social development in Central Aceh.

Keywords: Base Sector, Central Aceh, Fiscal Independence, GRDP, Regional Original Revenue.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian fiskal suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam dan manusia secara berkelanjutan (Arsyad, 2010; Todaro & Smith, 2015). Dalam konteks otonomi daerah yang dimulai sejak 1999, pemerintah kabupaten/kota memperoleh kewenangan lebih luas dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan lokal, namun dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan pendapatan sendiri yang memadai guna membiayai pembangunan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018). Indikator utama kinerja ekonomi daerah banyak diwakili oleh *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*, yang mencerminkan nilai tambah total barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu wilayah dalam periode tertentu sehingga menjadi tolok ukur kuantitatif pertumbuhan dan performa ekonomi regional (Astuti & Purwiyanta, 2024).

PDRB tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja perekonomian, tetapi juga menjadi dasar evaluasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan perencanaan fiskal daerah karena data ini mencerminkan kondisi nyata perekonomian yang perlu dijadikan pedoman alokasi sumber daya (Nicola & Saleh, 2025). Selain itu, analisis berbasis PDRB dapat mengidentifikasi sektor unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian suatu wilayah, yang esensial dalam merumuskan strategi pengembangan sektor unggulan guna memperkuat basis ekonomi daerah (Gatari et al., 2025). Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap dinamika PDRB penting untuk mendukung keputusan perencanaan fiskal dan perumusan kebijakan pembangunan yang efektif, terutama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Studi terdahulu menunjukkan disparitas pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Indonesia. Beberapa penelitian menemukan bahwa meskipun PDRB suatu daerah meningkat, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan masih rendah, sehingga kemandirian fiskal belum optimal (Purwono, 2019). Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB meliputi investasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur, sementara distribusi manfaat pertumbuhan seringkali tidak merata antarsektor dan antarlapisan masyarakat (Pratama & Arif, 2024; Sjaferi & Kuncoro, 2018). Di sisi lain, pertumbuhan sektor jasa yang dipicu oleh event nasional, seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI, dapat memberikan efek multiplier jangka pendek terhadap pariwisata, transportasi, akomodasi, dan jasa keuangan (Hidayat & Zulfikar, 2021). Namun, efektivitas konversi pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan kapasitas fiskal daerah bergantung pada struktur ekonomi lokal, hilirisasi komoditas unggulan, dan kapasitas kelembagaan pajak daerah. Pertumbuhan ekonomi juga diiringi transformasi sosial, seperti perubahan pola konsumsi, peningkatan daya beli, diversifikasi mata pencaharian, dan munculnya kelas menengah baru, namun dampaknya bervariasi tergantung kebijakan redistribusi dan pengelolaan ekonomi lokal (Sartini et al., 2022).

Kabupaten Aceh Tengah memiliki karakteristik ekonomi yang unik sebagai daerah agraris dan penghasil kopi Arabika berkualitas tinggi, dengan sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar PDRB (B. P. S. K. A. Tengah, 2024). Sektor perdagangan, konstruksi, administrasi pemerintahan, transportasi, dan jasa penunjang menunjukkan pertumbuhan signifikan, terutama setelah penyelenggaraan PON XXI (P. K. A. Tengah, 2023). Meskipun *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* dan PDRB per kapita menunjukkan tren peningkatan yang konsisten di banyak daerah, kenyataan bahwa rasio *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* terhadap PDRB tetap rendah mencerminkan kemandirian fiskal yang belum optimal, sehingga ketergantungan pada alokasi dana pusat masih tinggi dan kapasitas fiskal lokal belum sepenuhnya mampu mendukung pembangunan yang mandiri (Santoso et al., 2023; Sulistiyono et al., 2023).

Selain sektor pertanian, sektor jasa di Aceh Tengah menunjukkan dinamika yang semakin signifikan, terutama setelah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI. PON XXI tidak hanya berperan sebagai stimulus ekonomi jangka pendek melalui peningkatan aktivitas pariwisata, transportasi, akomodasi, perdagangan, dan jasa keuangan, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang memicu intensifikasi interaksi antara masyarakat lokal dan pendatang dari berbagai daerah (Hidayat & Zulfikar, 2021). Interaksi tersebut membawa perubahan dalam pola konsumsi, orientasi usaha jasa, serta cara masyarakat lokal memaknai peluang ekonomi baru. Dengan demikian, PON XXI dapat dipahami tidak semata sebagai event ekonomi, melainkan sebagai arena transformasi sosial yang membentuk ulang relasi ekonomi, budaya, dan ruang sosial di Aceh Tengah.

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa rendahnya kontribusi PAD sebagai sumber otonomi fiskal menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan pertumbuhan ekonomi dan diversifikasi sektor, termasuk sektor jasa, menjadi basis pendapatan yang kuat, sehingga pertumbuhan tersebut belum berdampak signifikan pada kapasitas fiskal dan pembangunan sosial yang inklusif (Ramadhan et al., 2025). Selain itu, literature empiris menegaskan bahwa peningkatan *fiscal autonomy*

melalui optimalisasi PAD berkorelasi positif dengan peningkatan *human development* dan kemampuan fiskal, namun capaian ini masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas administratif dan rendahnya *revenue mobilization* di sektor ekonomi lokal (Roy & Sachdeva, 2025; Ramadhan et al., 2025). Oleh karena itu, pertanyaan tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dan diversifikasi sektor jasa dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pembangunan sosial yang inklusif menjadi penting sebagai fokus kebijakan fiskal daerah.

Berdasarkan kesenjangan empiris dan karakteristik lokal tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan secara simultan: (1) analisis struktur ekonomi sektor basis dan non-basis; (2) dinamika PDRB dan PDRB per kapita dalam fase pemulihan pascapandemi dan pascaevent nasional; (3) kinerja PAD sebagai indikator kemandirian fiskal daerah; serta (4) implikasi sosial dari pertumbuhan ekonomi dan ekspansi sektor jasa. Kajian ini memberikan kontribusi empiris terhadap literatur ekonomi regional Indonesia, khususnya dalam memahami keterbatasan konversi pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas ekspor primer menjadi kemandirian fiskal dan transformasi sosial yang inklusif di tingkat daerah.

Permasalahan penelitian dirumuskan dalam empat pertanyaan utama: (1) sektor ekonomi apa saja yang tergolong basis dan non-basis dalam struktur PDRB Aceh Tengah serta bagaimana dinamika kontribusinya; (2) bagaimana perkembangan PDRB dan PDRB per kapita selama periode 2020–2024 dalam konteks pemulihan pascapandemi dan pasca-PON XXI; (3) bagaimana hubungan antara PDRB dan PAD sebagai cerminan kemandirian fiskal daerah serta faktor-faktor penghambat optimalisasi PAD; dan (4) bagaimana implikasi perkembangan PDRB terhadap perubahan sosial masyarakat, termasuk daya beli, pola konsumsi, struktur pekerjaan, dan interaksi sosial lokal.

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur perekonomian Aceh Tengah, mengkaji dinamika PDRB dan kemandirian fiskal daerah, serta menjelaskan perubahan sosial yang menyertai pertumbuhan ekonomi regional. Hasil kajian diharapkan tidak hanya memperkaya diskursus akademik mengenai ekonomi regional dan keuangan daerah, tetapi juga memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan hilirisasi komoditas unggulan, optimalisasi PAD, dan pengembangan sektor jasa yang berkelanjutan serta sensitif terhadap dimensi sosial dan humaniora di Aceh Tengah.

METODE

Desain dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang dipadukan dengan analisis deskriptif-kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika ekonomi dan fiskal daerah. Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan untuk memotret secara objektif perkembangan indikator ekonomi dan fiskal daerah dalam kurun waktu tertentu, sedangkan pendekatan deskriptif-kualitatif berfungsi untuk menafsirkan implikasi sosial dari dinamika tersebut dalam konteks lokal Aceh Tengah.

Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak diarahkan pada pengujian hubungan kausal atau estimasi model ekonometrika inferensial, melainkan pada upaya mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan karakteristik perubahan ekonomi daerah serta keterkaitannya dengan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif memungkinkan analisis yang tidak hanya berhenti pada angka statistik, tetapi juga menjelaskan makna sosial-ekonomi yang terkandung di balik perubahan indikator PDRB dan PAD (Arsyad, 2010).

Data dan Sumber Data

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang bersumber dari institusi resmi dan dokumen perencanaan pemerintah daerah. Data utama yang dianalisis meliputi:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dan harga konstan;
2. PDRB per kapita;
3. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah periode 2020–2024.

Sumber data utama diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024 serta laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Untuk memperkuat konteks analisis, penelitian ini juga memanfaatkan data pendukung berupa jumlah penduduk, dokumen kebijakan fiskal dan pembangunan daerah, serta dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023. Data pendukung tersebut digunakan untuk menafsirkan arah kebijakan dan dinamika sosial-ekonomi yang menyertai perkembangan indikator ekonomi daerah.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian dikelompokkan ke dalam variabel ekonomi, fiskal, dan sosial. Variabel ekonomi mencakup PDRB total dan PDRB per kapita sebagai indikator kinerja dan tingkat kesejahteraan ekonomi, serta kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap total PDRB dalam bentuk persentase sebagai dasar identifikasi sektor basis dan non-basis. Variabel fiskal direpresentasikan oleh nilai PAD dan rasio PAD terhadap PDRB yang digunakan sebagai indikator tingkat kemandirian fiskal daerah.

Sementara itu, variabel sosial tidak diukur melalui indikator kuantitatif tersendiri, melainkan dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi terhadap perubahan daya beli, pola konsumsi, struktur pekerjaan, serta mobilitas sosial masyarakat. Variabel sosial tersebut diposisikan sebagai refleksi dari implikasi pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sektoral terhadap kehidupan sosial masyarakat Aceh Tengah.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu penelusuran dan pengumpulan data dari publikasi statistik BPS, laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, penelusuran literatur ilmiah terkait ekonomi regional, keuangan daerah, dan perubahan sosial dilakukan untuk memperkuat kerangka interpretasi analisis.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan menyajikan tabel dan grafik perkembangan PDRB, PDRB per kapita, kontribusi sektoral, dan PAD selama periode 2020–2024. Analisis struktur ekonomi dilakukan dengan mengamati besaran kontribusi masing-masing sektor dan perubahan komposisi sektoral antar tahun untuk mengidentifikasi sektor basis dan non-basis. Selanjutnya, hubungan antara PDRB dan PAD dianalisis melalui pengamatan tren keduanya serta perhitungan rasio PAD terhadap PDRB sebagai indikator kemandirian fiskal daerah.

Pendekatan deskriptif-kualitatif dilakukan melalui interpretasi temuan kuantitatif dengan menggunakan studi dokumen dan analisis naratif. Data PDRB, khususnya perubahan sektor dominan dan peningkatan PDRB per kapita, ditafsirkan dengan mengaitkannya pada informasi kebijakan, dokumen perencanaan daerah, serta literatur ilmiah mengenai perubahan sosial dan ekonomi lokal. Proses ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi dan ekspansi sektor tertentu—termasuk sektor jasa pasca penyelenggaraan PON XXI—berkorelasi dengan perubahan gaya hidup, pola konsumsi, orientasi pekerjaan, dan interaksi sosial masyarakat. Dengan demikian, analisis kualitatif tidak berdiri terpisah dari data kuantitatif, melainkan berfungsi sebagai kerangka interpretatif untuk menjelaskan makna sosial dari dinamika ekonomi yang teridentifikasi (Arsyad, 2010; Tarigan, 2005).

Secara ringkas, tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Analisis deskriptif kuantitatif perkembangan PDRB, PDRB per kapita, kontribusi sektoral, dan PAD periode 2020–2024;
2. Analisis struktur ekonomi melalui identifikasi sektor basis dan non-basis berdasarkan kontribusi sektoral;
3. Analisis hubungan PDRB dan PAD melalui pengamatan tren dan perhitungan rasio PAD terhadap PDRB;
4. Analisis deskriptif-kualitatif perubahan sosial melalui penafsiran temuan kuantitatif yang dikaitkan dengan dokumen kebijakan dan konsep perubahan sosial dalam literatur ilmiah.

Pendekatan metodologis ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran empiris yang utuh mengenai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi daerah, kemandirian fiskal, dan dinamika sosial masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Ekonomi dan Sektor Basis Kabupaten Aceh Tengah

Hasil analisis struktur ekonomi Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah sangat dipengaruhi oleh sektor primer berupa pertanian, kehutanan, dan perikanan yang secara konsisten berkontribusi dominan terhadap total PDRB, sehingga mencerminkan

karakter ekonomi regional yang agraris dan bergantung pada sumber daya alam primer (*primary sector*) sebagaimana diidentifikasi melalui pendekatan kontribusi sektoral dalam kajian perekonomian regional (Syaputra et al., 2025). Orientasi ekspor komoditas unggulan seperti *arabica coffee* Gayo semakin memperkuat peran sektor basis tersebut, di mana kapasitas produksi yang besar merefleksikan tingkat daya saing yang tinggi pada skala global meskipun struktur rantai nilai komoditas ini masih relatif lemah akibat keterbatasan hilirisasi pengolahan di tingkat lokal (Wirda et al., 2025). Ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah tanpa dukungan industri pengolahan yang memadai berdampak pada rendahnya *value added* yang tercipta di daerah, sehingga manfaat ekonomi utama lebih banyak dinikmati oleh pelaku ekonomi di luar wilayah Aceh Tengah, suatu kondisi yang sejalan dengan pola ketidakseimbangan struktural antara sektor basis dan sektor pengolahan di berbagai daerah penghasil komoditas primer di Indonesia (Amrizal & Apriyani, 2025). Secara keseluruhan, struktur ekonomi Aceh Tengah menunjukkan dominasi sektor primer yang signifikan, sementara kontribusi sektor pengolahan dan proses hilirisasi masih terbatas, sehingga mengindikasikan perlunya kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih terintegrasi untuk memperkuat keterkaitan antara basis produksi dan *downstream processing* guna meningkatkan nilai tambah lokal dan mendorong diversifikasi struktur ekonomi yang berkelanjutan (Fitria et al., 2023; Khamimah, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter agraris serta orientasi ekspor komoditas kopi Gayo secara signifikan memperkuat posisi Kabupaten Aceh Tengah sebagai daerah basis produksi komoditas primer baik pada tingkat regional maupun nasional. Luas areal perkebunan kopi Gayo yang mencapai lebih dari 80.000 hektare dengan volume produksi tahunan melebihi 50.000 ton mencerminkan kapasitas produksi yang besar dan daya saing komoditas tersebut di pasar internasional. Meskipun demikian, dominasi ekspor bahan mentah tanpa dukungan industrialisasi hilir yang memadai menyebabkan penciptaan *value added* lebih banyak terjadi di luar wilayah Aceh Tengah. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui proses *downstream processing*. Keterbatasan pengolahan lanjutan juga menunjukkan adanya kesenjangan struktural antara sektor basis dan sektor pendukung yang seharusnya berkembang secara simultan. Temuan ini sejalan dengan pola umum di berbagai daerah penghasil komoditas primer di Indonesia, di mana keunggulan sektor basis tidak selalu diikuti oleh penguatan sektor pengolahan *local* (Arsyad, 2010).

Secara keseluruhan, struktur *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* Kabupaten Aceh Tengah selama periode 2019–2023 menunjukkan ketergantungan yang kuat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor basis utama dengan kontribusi lebih dari 40 persen terhadap perekonomian daerah. Dominasi sektor primer ini menegaskan karakter agraris Aceh Tengah, yang diperkuat oleh orientasi ekspor komoditas kopi Gayo sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi regional dan nasional. Namun demikian, rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan mencerminkan keterbatasan proses *downstreaming* atau hilirisasi, sehingga nilai tambah ekonomi komoditas unggulan masih banyak dinikmati oleh wilayah di luar daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keunggulan sektor basis belum diikuti oleh penguatan struktur ekonomi yang berimbang, khususnya dalam pengembangan sektor pengolahan lokal sebagai sumber peningkatan nilai tambah dan *local revenue*.

Perkembangan PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Aceh Tengah 2020–2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per kapita Kabupaten Aceh Tengah selama periode 2020–2024 memperlihatkan tren peningkatan yang relatif konsisten. Pada tahun 2020, perekonomian daerah mengalami kontraksi sebesar –1,21 persen sebagai dampak pandemi COVID-19, dengan PDRB per kapita tercatat sekitar Rp34,41 juta. Memasuki tahun 2021, perekonomian mulai memasuki fase pemulihan yang ditandai oleh pertumbuhan sebesar 3,21 persen dan peningkatan PDRB per kapita menjadi Rp36,57 juta. Akselerasi pertumbuhan berlanjut pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan mencapai 4,90 persen dan PDRB per kapita sebesar Rp39,64 juta. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,60 persen dengan PDRB per kapita mencapai Rp43,97 juta, sementara pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi relatif stabil pada angka 5,60 persen dengan PDRB per kapita meningkat menjadi Rp47,28 juta (B. P. S. K. A. Tengah, 2024).

Peningkatan PDRB per kapita sebesar lebih dari 37 persen dalam kurun waktu empat tahun mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan rata-rata penduduk secara agregat. Ketahanan struktur ekonomi Aceh Tengah yang berbasis sektor pertanian, khususnya perkebunan kopi Arabika Gayo, berperan penting dalam meredam dampak kontraksi ekonomi pada masa pandemi. Permintaan komoditas kopi yang relatif stabil di pasar global memungkinkan sektor primer tetap menjadi penopang utama perekonomian daerah, sehingga pemulihan pascapandemi berlangsung lebih cepat dibandingkan wilayah yang sangat bergantung pada sektor industri manufaktur modern.

Namun demikian, temuan ini juga mengungkap keterbatasan struktural dalam proses transformasi ekonomi daerah. Rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan dalam struktur PDRB menunjukkan bahwa aktivitas hilirisasi komoditas unggulan, khususnya kopi, belum berkembang secara optimal. Ketergantungan pada ekspor kopi dalam bentuk *green bean* menyebabkan sebagian besar nilai tambah ekonomi, termasuk proses pengolahan lanjutan, penciptaan merek, dan distribusi global, terserap di luar wilayah Aceh Tengah. Kondisi ini berdampak langsung pada terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal berbasis industri bagi penduduk lokal, sehingga peningkatan PDRB tidak sepenuhnya diikuti oleh perluasan kesempatan kerja berkualitas dan peningkatan pendapatan rumah tangga secara merata.

Keterbatasan hilirisasi tersebut menjelaskan mengapa peningkatan kinerja ekonomi makro belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi penguatan kesejahteraan sosial-ekonomi yang inklusif. Dominasi sektor primer cenderung menghasilkan lapangan kerja dengan produktivitas relatif rendah dan bersifat musiman, sementara sektor industri pengolahan yang berpotensi menciptakan nilai tambah tinggi, transfer keterampilan, dan stabilitas pendapatan masih berkontribusi marginal. Dengan demikian, meskipun PDRB per kapita meningkat secara signifikan, distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi masih menghadapi kendala struktural yang membatasi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat lokal.

Pada periode pascapandemi, dinamika ekonomi Aceh Tengah juga ditandai oleh menguatnya sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa penunjang. Momentum ini semakin diperkuat oleh penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang mendorong pertumbuhan signifikan pada sektor akomodasi, transportasi, dan jasa keuangan. Pertumbuhan sektor jasa tersebut memberikan efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Namun, sifat pertumbuhan yang relatif jangka pendek dan belum terintegrasi dengan pengembangan industri pengolahan lokal menyebabkan dampaknya terhadap penciptaan basis ekonomi jangka panjang masih terbatas.

Secara keseluruhan, perkembangan PDRB dan PDRB per kapita Kabupaten Aceh Tengah selama periode 2020–2024 mencerminkan resiliensi ekonomi daerah yang cukup kuat, ditopang oleh sektor pertanian dan didukung oleh diversifikasi sektor jasa pascapandemi dan event nasional. Akan tetapi, rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan menegaskan bahwa proses transformasi struktural ekonomi belum berjalan optimal. Tanpa penguatan hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan industri lokal, pertumbuhan ekonomi berisiko menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang bersifat parsial dan kurang inklusif. Temuan ini sejalan dengan pandangan Kirani & Santosa (2023) dan Wibowo et al., (2024) yang menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh laju pertumbuhan, tetapi juga oleh kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah domestik dan memperluas kesempatan kerja formal bagi masyarakatnya.

Hubungan PDRB, PAD, dan Kemandirian Fiskal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* dan *PDRB per capita* di Kabupaten Aceh Tengah mencerminkan kinerja ekonomi yang relatif baik, kontribusi *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* terhadap *PDRB* dan total pendapatan daerah masih tergolong rendah. Pada tahun 2024, target *PAD* ditetapkan sebesar Rp181 miliar, dan hingga semester pertama tahun 2025 realisasinya baru mencapai Rp84,22 miliar atau sebesar 46,53 persen dari target tahunan, yang mengindikasikan belum optimalnya kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan estimasi *PDRB* Aceh Tengah sebesar Rp10,4 triliun yang dihitung dari *PDRB per capita* sebesar Rp47,28 juta dengan jumlah penduduk sekitar 220 ribu jiwa, rasio *PAD* terhadap *PDRB* hanya berada pada kisaran 1,7–1,8 persen. Nilai rasio tersebut menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang masih rendah dan ketergantungan yang signifikan terhadap sumber pendanaan eksternal. Kondisi ini diperkuat oleh fakta bahwa porsi *PAD* dalam struktur pendapatan daerah masih lebih kecil dibandingkan dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi *PAD* guna meningkatkan kontribusinya terhadap *PDRB* dan memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Aceh Tengah (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (*PAD*) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (*PDRB*) dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural dan kelembagaan. Struktur ekonomi daerah yang didominasi oleh usaha kecil dan menengah pada sektor pertanian serta jasa informal menyebabkan basis pajak menjadi sempit dan sulit untuk dimaksimalkan. Selain itu, ekspor komoditas kopi yang masih didominasi dalam bentuk *green bean* mengakibatkan sebagian besar nilai tambah tercipta di luar wilayah produksi, sehingga potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Keterbatasan sistem administrasi serta rendahnya tingkat digitalisasi perpajakan daerah juga berkontribusi terhadap kurang efektifnya proses pemungutan *PAD*. Kondisi tersebut mencerminkan permasalahan klasik pada daerah yang bertumpu pada komoditas

primer, di mana potensi ekonomi yang besar tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa peningkatan PAD memerlukan transformasi struktur ekonomi, penguatan hilirisasi komoditas, serta perbaikan tata kelola dan sistem perpajakan daerah secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) dan PDRB per kapita di Kabupaten Aceh Tengah berada pada tingkat yang relatif baik, kontribusi *Pendapatan Asli Daerah* (PAD) terhadap PDRB dan total pendapatan daerah masih tergolong rendah, sehingga mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang terbatas. Rasio PAD terhadap PDRB yang hanya berkisar 1,7–1,8 persen mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sejalan dengan potensi ekonomi yang dimiliki, terutama karena dominasi dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi dalam struktur pendapatan daerah. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik struktur ekonomi yang didominasi usaha kecil dan menengah di sektor pertanian serta jasa informal, ekspor kopi yang masih berbasis *green bean* sehingga nilai tambah banyak tercipta di luar daerah, serta keterbatasan sistem administrasi dan digitalisasi perpajakan daerah. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa daerah dengan basis ekonomi komoditas primer cenderung menghadapi kendala struktural dalam meningkatkan rasio PAD terhadap PDRB, meskipun secara agregat menunjukkan kinerja ekonomi yang positif.

Implikasi Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Perubahan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh Tengah tidak hanya tercermin dalam peningkatan indikator makroekonomi, tetapi juga memunculkan transformasi sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama di pusat perkotaan Takengon. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan pendapatan rumah tangga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Fenomena ini tampak dari berkembangnya berbagai fasilitas komersial modern, seperti kedai kopi berkonsep kafe, pusat perbelanjaan skala lokal, restoran, serta ruang rekreasi perkotaan. Keberadaan fasilitas tersebut mencerminkan pergeseran gaya hidup masyarakat ke arah yang lebih urban dan berorientasi pada konsumsi berbasis pengalaman (*experience-based consumption*), yang umumnya diasosiasikan dengan peningkatan daya beli dan diferensiasi selera kelas menengah.

Namun demikian, kemunculan fasilitas komersial modern di Takengon tidak dapat dimaknai secara tunggal sebagai indikator kemajuan sosial-ekonomi. Di satu sisi, ekspansi kedai kopi modern dan pusat perbelanjaan merefleksikan dinamika ekonomi lokal yang semakin terintegrasi dengan pasar jasa dan pariwisata, serta berperan sebagai ruang sosial baru bagi interaksi masyarakat, termasuk pelaku usaha kopi, wisatawan, dan generasi muda. Di sisi lain, fenomena tersebut juga mengindikasikan kecenderungan konsumerisme yang berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan spasial antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pola konsumsi modern yang terkonsentrasi di Takengon cenderung dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas, sementara sebagian besar penduduk pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian primer belum sepenuhnya terlibat dalam sirkulasi ekonomi konsumtif tersebut.

Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor, barang elektronik, dan hunian permanen dengan fasilitas modern semakin menegaskan adanya diferensiasi sosial berbasis kemampuan ekonomi. Bagi masyarakat perkotaan, khususnya yang terlibat dalam sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata, pertumbuhan ekonomi membuka akses yang lebih luas terhadap gaya hidup modern. Sebaliknya, bagi masyarakat pedesaan, manfaat pertumbuhan ekonomi cenderung lebih terbatas dan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berpusat di kawasan perkotaan berpotensi menciptakan *dual social structure*, di mana modernisasi sosial berlangsung lebih cepat di pusat kota dibandingkan wilayah hinterland.

Implikasi sosial lainnya tercermin pada peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkorelasi dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Aceh Tengah. Peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi rumah tangga untuk membiayai kebutuhan pendidikan, baik dalam bentuk keberlanjutan sekolah menengah maupun partisipasi pada jenjang pendidikan tinggi. Secara simultan, pertumbuhan ekonomi daerah turut memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, yang tercermin dalam peningkatan belanja publik untuk sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga memperluas ketersediaan fasilitas dan layanan dasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan PDRB per kapita tidak hanya merefleksikan pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi juga berkontribusi terhadap perbaikan dimensi kualitas hidup masyarakat.

Meskipun demikian, korelasi antara peningkatan PDRB per kapita dan kualitas hidup masyarakat belum sepenuhnya bersifat merata dan inklusif. Manfaat pertumbuhan ekonomi lebih nyata dirasakan oleh masyarakat perkotaan yang memiliki akses lebih dekat terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, sementara masyarakat pedesaan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, jarak layanan, dan kapasitas ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, peningkatan pendapatan rata-rata belum secara otomatis menjamin pemerataan peningkatan kualitas hidup, melainkan sangat bergantung pada distribusi manfaat pertumbuhan dan efektivitas kebijakan publik. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Aceh Tengah telah berkontribusi positif terhadap peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, namun masih memerlukan intervensi kebijakan yang berorientasi pada pemerataan agar dampaknya benar-benar dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perubahan struktur pekerjaan turut mempercepat dinamika sosial tersebut. Tumbuhnya sektor pariwisata, akomodasi, transportasi, dan jasa keuangan membuka peluang kerja non-pertanian dan mendorong munculnya kelas menengah baru di Takengon. Kelompok ini umumnya memiliki pola konsumsi, aspirasi sosial, dan orientasi gaya hidup yang berbeda dengan masyarakat pedesaan, sehingga memperkuat diferensiasi sosial dan fenomena urbanisasi internal. Dalam kerangka teori modernisasi, kondisi ini mencerminkan transisi dari struktur ekonomi tradisional menuju ekonomi berbasis jasa dan konsumsi (Todaro & Smith, 2015; Yusuf et al., 2022). Namun, tanpa kebijakan yang mampu menjembatani keterkaitan ekonomi kota desa, transformasi tersebut berisiko memperdalam ketimpangan sosial dan memperlemah kohesi sosial daerah.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi di Aceh Tengah berimplikasi signifikan terhadap perubahan sosial masyarakat, khususnya melalui transformasi gaya hidup dan pola konsumsi di Takengon. Kemunculan fasilitas komersial modern dapat dipandang sebagai simbol kemajuan ekonomi dan urbanisasi sosial, tetapi sekaligus menjadi indikator potensi konsumerisme dan ketimpangan spasial. Temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diiringi oleh kebijakan pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan, agar transformasi sosial tidak hanya terkonsentrasi di pusat perkotaan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Aceh Tengah masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor basis, dengan dukungan penting dari sektor perdagangan, konstruksi, dan jasa pemerintahan, sementara sejumlah sektor lain berperan sebagai non-basis. PDRB dan PDRB per kapita menunjukkan tren peningkatan konsisten sepanjang 2020–2024, yang mencerminkan resiliensi dan akselerasi pertumbuhan pasca pandemi, diperkuat oleh momentum event nasional seperti PON XXI.

Namun, kontribusi PAD terhadap PDRB dan pendapatan daerah masih relatif rendah sehingga kemandirian fiskal belum sejalan dengan kinerja PDRB. Kondisi ini berkaitan dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor primer dan informal, lemahnya hilirisasi komoditas unggulan, serta keterbatasan administrasi perpajakan daerah. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi berimplikasi positif pada peningkatan daya beli, perubahan pola konsumsi, diversifikasi pekerjaan, dan mobilitas sosial, meskipun berpotensi menimbulkan kesenjangan baru jika tidak diimbangi kebijakan sosial yang tepat.

Beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan:

1. Hilirisasi Komoditas Unggulan: Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan industri pengolahan kopi Gayo dan agroindustri hortikultura untuk meningkatkan nilai tambah lokal dan memperluas basis pajak dari sektor industri pengolahan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pemberian insentif investasi, pelatihan pengusaha, dan pengembangan kluster industri kopi.
2. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan sektor jasa bernilai tambah tinggi perlu diprioritaskan untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan sektor jasa dan menciptakan lapangan kerja yang lebih beragam. Penyelenggaraan PON XXI telah meningkatkan brand awareness Aceh Tengah, sehingga konversi momentum ini menjadi investasi pariwisata jangka panjang sangat penting.
3. Digitalisasi Perpajakan: Digitalisasi dan peningkatan transparansi sistem perpajakan dan retribusi daerah perlu dipercepat guna meningkatkan efektivitas pemungutan PAD dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah (WR Publishing, 2025; Duniadosen.com, 2024).
4. Kebijakan Pembangunan Sosial Inklusif: Kebijakan pembangunan sosial harus diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, mengurangi kesenjangan desa–kota, dan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, A., & Apriyani, R. (2025). Analisis ketimpangan struktur ekonomi dan peran sektor basis dalam pembangunan daerah penghasil komoditas primer di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Pertanian*, 7(1), 45–58. <https://ejournal.unib.ac.id/jeperta/article/view/35382>
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Fitria, M., Pandin, A. T., Shabrina, A., Gunawan, D. F., Prianka, W. T., & Gunadi, H. (2023). Penerapan Design Thinking dalam Perancangan Strategi Pemasaran UMKM Jahe Cap Maher. *Journal of Research on Business and Tourism*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.37535/104003120231>
- Hidayat, M., & Zulfikar, T. (2021). Dampak penyelenggaraan event besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan transformasi sektor pariwisata: Analisis Banjarmasin Fair 2018. *Jurnal Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 12(2), 178–198.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, D. J. P. (2018). Siaran Pers PP23-DJP Klaimantan Timur dan Utara, 2018. Siaran Pers Tentang Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0,5%, 1.
- Khamimah, W. (2021). Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(3), 2017. <https://doi.org/10.32493/drj.v4i3.9676>
- Kirani, C., & Santosa, S. (2023). Kontribusi Perempuan sebagai Pengusaha Fashion dalam Implementasi Sustainable Fashion untuk Membangun Lingkungan yang Berkelanjutan. *Jurnal Ecogen*, 6(4), 520. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v6i4.15352>
- Pratama, M. A. R., & Arif, M. (2024). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Industri Sedang dan Besar di Kabupaten Jepara Tahun 2001-2022. *Jurnal EMT KITA*, 8(1), 347–354. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i1.2096>
- Purwono, H. (2019). Hilirisasi produk dan peningkatan kemandirian fiskal daerah: Pembelajaran dari pengembangan industri kopi di Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*, 3(1), 88–112.
- Santoso, J., Arion Hutapea, S., Fitri, L., & Kahir, S. (2023). Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah. 7(1). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>
- Sartiwi, R., Priyatno, D., & Suryanto. (2022). Pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan ketimpangan pendapatan: Studi longitudinal Kabupaten Klaten 2015–2019. *Jurnal Sosiologi Pembangunan*, 15(1), 56–79.
- Sjafari, A., & Kuncoro, M. (2018). Determinan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia: Peran investasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur. *Jurnal Ekonomi Regional*, 9(2), 123–147.
- Sulistiyono, H., Martua, A., Sayuti, Mulyana, & Ginting, I. T. (2023). GOVERNMENT PERFORMANCE PADA KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIGITAL: BAGAIMANA TRANSFORMATION CAPABILITY MEMPENGARUHINYA? (STUDI EMPIRIS DI PROVINSI MALUKU UTARA). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(2), 95–113. <https://doi.org/10.33701/jkp.v6i2.3679>
- Syaputra, M., Rahman, A., & Hidayat, R. (2025). Analisis struktur ekonomi dan sektor unggulan daerah berbasis Produk Domestik Regional Bruto. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 8(2), 101–115. <https://jiej.ulm.ac.id/index.php/jiej/article/view/2865>
- Tengah, B. P. S. K. A. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Tengah Menurut Lapangan Usaha 2020–2024*. BPS.
- Tengah, P. K. A. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Tengah 2023–2028*. Pemkab Aceh Tengah.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development (12th ed.)*. Pearson.
- Wibowo, A., Lestari, E., & Sugihardjo. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Modal Sosial dan Peran Stakeholder dalam Pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Penyuluhan*, 20(01), 149–164. <https://doi.org/10.25015/20202446684>
- Widjaja, W. (2017). Kemandirian fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi: Analisis empiris 43 kabupaten di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(4), 321–346.
- Wirada, F., Siregar, H., & Tambunan, M. (2025). Daya saing dan rantai nilai kopi arabika Gayo dalam perdagangan internasional. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 13(1), 23–37. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jagbi/article/download/60888/30859>
- Yusuf, E. B., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Inovasi Layanan Perbankan Syariah Berbasis Teknologi sebagai Wujud Penerapan Green Banking. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>